

## ABSTRAK

Perjudian adalah bentuk patologi sosial. Perjudian mengancam berlangsungnya ketertiban sosial sebab ancaman terhadap norma-norma sosial. Sehingga menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek material dan spiritual. Oleh sebab itu perjudian harus ditanggulangi dengan secara rasional. Salah satu usaha yang rasional tersebut adalah dengan pendekatan kebijakan penegakan hukum pidana.

Masalah yang dihadapi yaitu bagaimana kebijakan hukum pidana saat ini telah memadai dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dan bagaimana kebijakan hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana perjudian di masa data.

Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian terhadap data sekunder.

Ketentuan tentang tindak pidana perjudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Akan tetapi kebijakan formulasi dalam undang-undang mempunyai beberapa kelemahan. Pada tahap penerapan, hakim tidak bebas menentukan jenis sanksi pidana yang akan dikenakan terhadap pelaku tindak pidana perjudian. Hal ini disebabkan sistem minimum umum dan sistem maksimum umum yang dianut oleh KUHP, sehingga apapun jenis sanksi pidana yang tertuang dalam undangundang harus diterapkan oleh hakim. Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi perjudian di masa yang akan datang tetap harus dilakukan dengan sarana penal. Kebijakan formulasi hukum pidana harus lebih optimal dan mampu untuk menjangkau perkembangan tindak pidana perjudian yang menggunakan kecanggihan teknologi.

Kata kunci : Penyidikan Pidana, Perjudian.

## **ABSTRACT**

*Gambling is a form of social pathology. Gambling threatens the ongoing social order because of threats to social norms. So that it becomes an obstacle to national development that has material and spiritual qualities. Therefore gambling must be dealt with rationally. One of the rational endeavors is a criminal law enforcement policy approach.*

*The problem faced is how the current criminal law policy is adequate in tackling gambling crime and how criminal law policy is to cope with data gambling crimes.*

*The research method used is normative juridical, namely by reviewing or analyzing secondary data in the form of secondary legal materials by understanding the law as a set of rules or positive norms in the legislative system that regulates human life. So this research is understood as library research, namely research on secondary data.*

*Provisions concerning the criminal act of gambling in the Criminal Code (KUHP) have been amended in Law Number 7 of 1974 concerning Managing Gambling. However, the formulation policy in the law has several weaknesses. In the implementation phase, the judge is not free to determine the type of criminal sanction that will be imposed on the perpetrator of the gambling crime. This is due to the general minimum system and the general maximum system adopted by the Criminal Code, so that any type of criminal sanction contained in the law must be applied by the judge. The criminal law policy in tackling future gambling must still be done by means of reasoning. The criminal law formulation policy must be more optimal and able to reach the development of gambling criminal acts that use technological sophistication.*

*Keywords: Investigation of Gambling Crime*